

PUTIN DAN KEDAULATAN ENERGI: KEPEMIMPINAN AUTARKI SEBAGAI BASIS STRATEGI PERTAHANAN NASIONAL

Roli Dewanto¹, Mandri Kartono, Tarsisius Susilo³, Setiawan Arismunandar⁴, Edi Wahyudi⁵

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia

1jordhidewanto@gmail.com, 2mandrikartono@gmail.com, 3muchus70@gmail.com

Abstrak: Kepemimpinan Vladimir Putin yang bercorak autarki menekankan kemandirian Rusia dalam sumber daya, khususnya energi, sebagai landasan strategi pertahanan nasional. Tekanan geopolitik Barat seperti ekspansi NATO dan sanksi ekonomi mendorong Putin menjadikan "senjata energi" sebagai alat tawar strategis Rusia. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan kedaulatan energi Putin membentuk kekuatan pertahanan Rusia, serta pelajaran yang dapat diambil Indonesia dalam membangun sistem pertahanan berbasis sumber daya alam (SDA) strategis sendiri. Literatur menunjukkan Rusia berhasil memanfaatkan dominasi ekspor gas/minyak untuk pengaruh geopolitik, sementara domestik Rusia memperkuat kontrol negara atas sektor energi dan swasembada alutsista meski dihadang sanksi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus Rusia dan perbandingan dengan konteks Indonesia. Hasil analisis menegaskan bahwa penguasaan SDA dapat meningkatkan ketahanan pertahanan; Rusia membiayai modernisasi militernya dari boom migas dan relatif tangguh terhadap embargo melalui inovasi lokal. Bagi Indonesia, kemandirian energi adalah prasyarat pertahanan jangka panjang yang harus diintegrasikan ke doktrin nasional. Namun, pendekatan Indonesia harus beretika Pancasila memanfaatkan SDA untuk ketahanan sendiri tanpa menggunakan energi sebagai alat pemerasan. Rekomendasi utama mencakup sinergi lintas sektor (ESDM–Pertahanan) untuk cadangan energi strategis TNI, investasi pada energi baru (biofuel, baterai) untuk alutsista, dan penguatan industri pertahanan berbasis SDA. Langkah-langkah ini akan menuju postur pertahanan Indonesia 2045 yang tangguh dan mandiri, selaras dengan nilai etika dan kerja sama global.

Kata kunci: Putin, kedaulatan energi, strategi pertahanan, autarki, Pancasila, Indonesia 2045

Abstract: Vladimir Putin's autarkic leadership emphasizes Russia's self-reliance in resources, particularly energy, as the foundation of its national defense strategy. Western geopolitical pressures such as NATO expansion and economic sanctions pushed Putin to weaponize energy as Russia's strategic bargaining tool. This article examines how Putin's energy sovereignty policies shaped Russia's defense capabilities and explores lessons Indonesia can adopt in building a defense system based on strategic natural resources. Literature shows that Russia has leveraged its dominance in oil and gas exports for geopolitical influence, while domestically reinforcing state control over the energy sector and pursuing defense self-sufficiency despite sanctions. This study employs a qualitative case study approach, comparing Russia's experience with Indonesia's context. The analysis confirms that mastery of natural resources strengthens defense resilience; Russia financed its military modernization through energy windfalls and remained relatively resilient against embargoes through local innovation. For Indonesia, energy sovereignty is a prerequisite for long-term defense and must be integrated into national doctrine. However, Indonesia's approach must adhere to Pancasila ethics utilizing resources for self-defense without weaponizing them for coercion. Key recommendations include cross-sector synergy (Energy–Defense) to secure strategic reserves for the armed forces, investment in new energy sources (biofuels, batteries) for military platforms, and strengthening resource-based defense industries. These steps will shape Indonesia's 2045 defense posture into a resilient and self-reliant system, aligned with ethical values and global cooperation.

Keywords: Putin, energy sovereignty, defense strategy, autarky, Pancasila, Indonesia 2045

Pendahuluan

Vladimir Putin mempraktikkan gaya kepemimpinan otokratis berhaluan autarki yang berupaya menjadikan Rusia mandiri dan berdaulat dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Sejak awal kekuasaannya, Putin menyadari bahwa *kedaulatan energi* kemandirian dalam produksi dan kontrol minyak serta gas dapat dijadikan fondasi kekuatan nasional Rusia. Tekanan geopolitik seperti ekspansi NATO ke Eropa Timur dan berulangnya sanksi ekonomi Barat terhadap Moskow kian mengukuhkan pandangan Putin untuk mengubah energi menjadi senjata strategis. Dalam berbagai krisis, Rusia di bawah Putin tak segan memanfaatkan dominasi ekspor gasnya sebagai alat tawar geopolitik. Contohnya, pada sengketa dengan Ukraina dan Eropa, Rusia beberapa kali membatasi bahkan memotong pasokan gas alam, memicu gejolak di Eropa guna menekan kepentingan lawan. Langkah-langkah semacam itu menunjukkan energi diperlakukan layaknya domain pertahanan multi-dimensi – selain aspek militer konvensional, energi menjadi domain strategis yang dikendalikan Rusia untuk mencapai tujuan keamanan nasionalnya.

Dalam konteks ini, Putin membangun reputasi Rusia sebagai “energy superpower”, terutama di sektor gas alam, yang pengaruhnya sangat terasa di Eropa. Upaya menjadikan energi sebagai “senjata” relatif berhasil meningkatkan posisi tawar Rusia, misalnya dengan mendorong harga energi dunia naik saat pasokan diketatkan. Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan pengetatan kontrol negara atas perusahaan-perusahaan energi raksasa (seperti Gazprom dan Rosneft) sehingga keputusan strategi energi nasional terpusat di Kremlin. Kepemimpinan autarki Putin yang terpusat dan kuat diyakini menjadi faktor pendorong kemandirian Rusia dalam menghadapi tekanan eksternal.

Pertanyaan kunci yang muncul adalah bagaimana model kedaulatan energi ala Putin ini berperan dalam membentuk strategi pertahanan nasional Rusia, dan sejauh mana pengalaman tersebut memberikan pelajaran bagi Indonesia. Indonesia memiliki potensi SDA besar (migas, batubara, mineral strategis); kemandirian energi tentu menjadi agenda penting menuju ketahanan nasional jangka panjang. Karena itu, studi ini akan mengkaji integrasi sektor energi ke strategi pertahanan Rusia di bawah Putin, serta merefleksikannya untuk perumusan sistem pertahanan berbasis SDA di Indonesia yang tetap berlandaskan prinsip Pancasila.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana kebijakan kedaulatan energi Putin (model kepemimpinan autarki) membentuk strategi pertahanan Rusia, dan pelajaran apa yang relevan bagi pembangunan sistem pertahanan berbasis sumber daya strategis di Indonesia?

Pentingnya Topik

Topik ini penting karena dapat memberikan lesson learned bagi Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan nasional berbasis kemandirian SDA. Rusia di bawah Putin berhasil memanfaatkan kekayaan energi sebagai aset strategis pertahanan dan politik. Indonesia dengan potensi migas, batubara, nikel, dan SDA lainnya perlu belajar bagaimana *kedaulatan energi* dapat meningkatkan kemandirian pertahanan, tentunya disesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai Indonesia. Pembelajaran ini relevan terutama dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045, di mana pemerintah menargetkan ketahanan nasional yang komprehensif. Salah satu misi utama pembangunan 2045 menekankan modernisasi pertahanan bersamaan dengan kemandirian di bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional menyeluruh. Artinya, kemandirian energi bukan hanya agenda ekonomi,

tetapi inheren dalam konsep ketahanan dan pertahanan bangsa jangka panjang. Selain itu, studi ini penting untuk mengelaborasi bagaimana prinsip Pancasila (misalnya anti-ekspansionisme, kemanusiaan, keadilan sosial) dapat sejalan dengan strategi *resource-based defense*. Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil manfaat dari pengalaman Rusia tanpa harus mengadopsi sisi hegemoniknya, melainkan menerapkan kemandirian SDA yang tetap mengedepankan perdamaian dan kerja sama global.

Tinjauan Pustaka

Kedaulatan Energi: Konsep dan Relevansi

Kedaulatan energi (*energy sovereignty*) didefinisikan sebagai hak dan kemampuan suatu negara untuk mengelola sumber-sumber energi secara mandiri demi kepentingan nasional. Konsep ini menekankan kontrol domestik atas produksi, distribusi, dan penggunaan energi, sehingga kebijakan energi tidak mudah dipengaruhi atau dikendalikan pihak asing. Literatur global banyak menyoroti Rusia sebagai contoh negara yang mempraktikkan kedaulatan energi secara agresif. Rusia menggunakan ekspor minyak dan gas bukan semata untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik suatu fenomena yang kerap disebut "*weaponization of energy*". Artinya, pasokan energi dijadikan senjata diplomasi: disuplai ke mitra yang kooperatif, atau ditahan/dikurangi terhadap pihak yang berseberangan secara politik.

Studi-studi kasus di Eropa mendokumentasikan bagaimana Rusia secara berkala membatasi pasokan gas ke negara-negara Eropa sebagai alat tekanan politik. Misalnya, krisis gas Rusia–Ukraina pada tahun 2006 dan 2009 membuat beberapa negara Eropa mengalami kekurangan pasokan musim dingin akibat Rusia *memutus aliran gas* dalam sengketa harga dan pembayaran. Taktik ini menciptakan leverage politik bagi Kremlin dalam negosiasi keamanan yang lebih luas. Analisis Atlantic Council juga menunjukkan bahwa penggunaan suplai gas sebagai senjata politik cukup berhasil meningkatkan daya tawar Rusia meski mengorbankan reputasi Rusia sebagai pemasok terpercaya. Dari perspektif ketahanan regional, hal ini memicu Uni Eropa untuk mencari diversifikasi energi, tetapi jangka pendeknya Rusia mampu meraih keuntungan ekonomi (harga gas melonjak) sekaligus menekan pihak lain.

Di sisi lain, literatur dalam negeri Indonesia memandang *kedaulatan energi nasional* sebagai prasyarat mutlak kemajuan bangsa dan elemen penting ketahanan nasional. Kedaulatan energi sudah lama diamanatkan oleh konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) agar sumber daya penting dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Darusalam & Fitri (2016) menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju berlandaskan Pancasila selama tata kelola energi masih bergantung asing dan tidak membawa manfaat signifikan bagi kemajuan bangsa. Ketergantungan pada investasi dan teknologi asing di sektor migas/minerba melemahkan fungsi negara dalam menjaga ketersediaan energi nasional. Oleh karena itu, mencapai kedaulatan energi dipandang sebagai keniscayaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi maupun pertahanan negara. Intinya, literatur menggarisbawahi bahwa kemandirian energi domestik memberi ruang manuver strategis bagi suatu negara dalam menghadapi tekanan global, baik di ranah ekonomi maupun keamanan.

Kepemimpinan Autarki Vladimir Putin

Karakteristik kepemimpinan Vladimir Putin sering digambarkan otoriter, sentralistik, dan bertipe *strongman*. Sejak awal menjabat (tahun 2000), Putin menerapkan konsolidasi kekuasaan terpusat atau *vertical power*, di mana keputusan strategis ditarik ke lingkaran inti di Kremlin. Salah satu manifestasinya adalah kontrol ketat negara terhadap sektor-sektor strategis, terutama energi. Putin melakukan

“nasionalisasi terselubung” sektor energi dengan memastikan perusahaan minyak dan gas terbesar Rusia berada di bawah kendali negara atau loyalisnya. Contohnya pada *Yukos affair* tahun 2003: pemerintah Rusia membubarkan perusahaan minyak swasta Yukos dan menyita aset-asetnya, yang kemudian dialihkan kepada Rosneft – BUMN energi yang dipimpin sekutu Putin. Langkah tersebut memperkuat dominasi negara di sektor minyak, mengirim pesan tegas bahwa oligarki energi harus sejalan dengan kepentingan negara. Gazprom, raksasa gas Rusia, juga dijaga mayoritas sahamnya oleh negara, menjadikannya *tangan panjang* Kremlin dalam politik energi.

Kepemimpinan Putin yang autarki ini sejalan dengan teori kepemimpinan otoriter dan konsep geo-economic power, di mana instrumen ekonomi (termasuk SDA) dipakai untuk tujuan geopolitik. Putin secara terbuka menyatakan bahwa kemandirian Rusia dalam sektor vital adalah bagian dari strategi keamanan nasional. Misalnya, Rusia memiliki Doktrin Keamanan Energi (*Energy Security Doctrine*) tersendiri yang memandang sektor energi sebagai bagian dari kerangka keamanan nasional dan mengidentifikasi ancaman-ancaman (termasuk sanksi dan dominasi asing) terhadap sektor energi tersebut. Integrasi kebijakan energi dengan pertahanan ini menunjukkan visi Putin: agar Rusia se bisa mungkin mengurangi ketergantungan kepada pihak eksternal di sektor strategis. Ketika Rusia dikenai sanksi berat Barat pasca-krisis Ukraina 2014, Putin merespons dengan meluncurkan Program Substitusi Impor besar-besaran. Program ini bertujuan mendorong produksi dalam negeri untuk menggantikan komponen impor, termasuk di industri pertahanan, demi mencapai *swasembada alutsista*. Targetnya sangat ambisius: 85% komponen militer impor digantikan produk lokal pada 2025. Meskipun realisasinya tersendat dan banyak kendala (SDM, teknologi tinggi, biaya tinggi), inisiatif ini menegaskan paradigma autarki Putin berupaya menutup kerentanan Rusia terhadap tekanan luar dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, gaya kepemimpinan Putin memadukan sentralisasi kekuasaan politik dengan mobilisasi sumber daya ekonomi negara untuk mendukung kedaulatan dan kekuatan pertahanan Rusia.

Strategi Pertahanan Rusia Berbasis SDA

Strategi pertahanan Rusia di era Putin sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, terutama minyak dan gas, sebagai penopang utama. Pendapatan energi menjadi tulang punggung anggaran pertahanan Rusia. Selama kurun booming harga minyak 2000-an hingga awal 2010-an, sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 30–50% pendapatan pemerintah Rusia. Dana melimpah ini dialokasikan Putin untuk memodernisasi militer secara besar-besaran. Program *State Armament Program* 2011–2020 misalnya, didanai oleh surplus minyak/gas, berhasil meningkatkan anggaran pertahanan dan melahirkan alutsista canggih seperti jet tempur Su-57 dan sistem rudal S-400. Dengan kata lain, boom komoditas energi langsung dikonversi menjadi build-up kekuatan militer. Selain itu, Rusia menggunakan kekayaan energi untuk membangun *cadangan devisa dan dana kekayaan negara* (*National Wealth Fund*) yang berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat krisis dan menopang biaya pertahanan ketika penerimaan negara turun. Langkah ini terbukti saat Rusia menghadapi sanksi dan penurunan harga minyak, dana cadangan tersebut membantu stabilisasi sementara militer terus beroperasi.

Pada tataran doktrin, Rusia memasukkan dimensi energi ke dalam konsep ketahanan nasionalnya. Doktrin Keamanan Nasional Rusia dan Doktrin Keamanan Energi sama-sama menegaskan bahwa keamanan energi adalah bagian tak terpisahkan dari keamanan negara. Kemandirian pasokan energi domestik dianggap krusial untuk kemampuan bertahan saat perang atau krisis. Hal ini tercermin, misalnya, dalam logistik militer Rusia yang relatif mandiri: militer Rusia tidak kekurangan BBM untuk operasional karena negara memiliki cadangan minyak yang besar dan kemampuan produksi dalam

negeri. Dari perspektif pertahanan autarki, Rusia berupaya memenuhi sendiri kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) semaksimal mungkin, apalagi setelah akses impor teknologi militer Barat tertutup pasca-2014. Industri pertahanan dalam negeri digenjot untuk memproduksi segala kebutuhan, dari senjata ringan hingga sistem strategis, meskipun harus menghidupkan kembali desain era Soviet atau bekerja sama dengan beberapa negara non-Barat. Ketika sanksi Barat memblokir impor komponen canggih (microchip, avionik, dll.), Rusia merespons dengan berbagai cara: pengembangan lokal, jalur alternatif lewat negara ketiga, hingga inovasi substitusi (misal penggunaan suku cadang sipil untuk peralatan militer). Ujian nyata kemandirian pertahanan Rusia terlihat dalam perang Ukraina (2022–kini). Walau akses teknologi tinggi terbatas, Rusia mampu mempertahankan kampanye militernya dengan kombinasi produksi domestik yang disederhanakan, penggunaan stok lama, dan bantuan mitra (seperti drone *Geran-2* hasil kerjasama luar negeri). Ini menunjukkan ketahanan dasar industri pertahanan Rusia yang dibangun atas sokongan SDA: selama energi dan bahan mentah tersedia, ekonomi perang Rusia masih bisa berputar.

Bagi Indonesia, tinjauan atas strategi Rusia ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan SDA strategis dapat langsung memperkuat pertahanan nasional. Namun, harus dicatat bahwa model Rusia juga datang dengan konsekuensi: ketergantungan berlebihan pada sektor tunggal (energi) membuat ekonomi pertahanan rentan fluktuasi harga komoditas dan sanksi tertentu. Oleh karena itu, diversifikasi dan *sustainable development* tetap perlu diimbangi dalam jangka panjang.

Penelitian Terdahulu dan Gap Kajian

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung topik “energi sebagai senjata” dan kemandirian pertahanan, baik dalam konteks Rusia maupun Indonesia. Sabadus (2022) dalam analisisnya di *Atlantic Council* mengulas efektifitas penggunaan gas alam oleh Putin sebagai senjata politik, terutama dalam krisis Ukraina terbaru. Ia menyimpulkan bahwa “senjata energi” Putin cukup berhasil menekan Eropa hingga pada titik tertentu, sebelum Eropa mencari solusi alternatif. Penelitian ini memberi bukti empiris bagaimana keputusan Gazprom mengurangi pasokan 2021–2022 mengerek harga gas dan menimbulkan krisis energi di Eropa, sebuah bentuk *blackmail* geopolitik yang nyata. Sementara itu, di Indonesia, kajian mengenai kemandirian energi nasional banyak diangkat oleh lembaga strategis seperti Lemhannas. Misalnya, Lemhannas menekankan bahwa kemandirian pada pangan, energi, dan air adalah pilar penting ketahanan nasional menuju 2045. Hal ini tercermin dalam agenda pemerintah terbaru (*Asta Cita Misi ke-2*) yang memasukkan kemandirian energi sebagai sasaran strategis guna memastikan ketahanan nasional yang utuh. Kajian akademik lokal (Darusalam & Fitri, 2016) juga menyatakan urgensi revitalisasi kebijakan energi agar berdaulat sebagai prasyarat visi Indonesia Maju, yang implikasinya termasuk bidang pertahanan.

Meskipun sudah ada studi-studi tersebut, terdapat gap yang hendak dijembatani penelitian ini. Belum banyak kajian komprehensif yang mengaitkan langsung pengalaman Rusia dalam memadukan kebijakan energi-pertahanan dengan pembelajaran bagi Indonesia. Studi Rusia cenderung fokus ke dampak geopolitik atau ekonomi energi semata, sedangkan studi Indonesia menyoroti kemandirian energi dalam konteks umum pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menjadikan pengalaman Rusia sebagai benchmark konseptual bagi Indonesia di sektor pertahanan. Melalui pendekatan perbandingan, diharapkan terjawab pertanyaan: sejauh mana model Putin bisa (atau tidak bisa) diadaptasi Indonesia, dengan tetap memperhatikan ideologi Pancasila dan konteks lingkungan strategis berbeda. Gap inilah yang menjadikan penelitian ini relevan untuk diisi.

Metodologi

Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pendekatan *comparative policy analysis*. Kasus utama yang dikaji secara mendalam adalah kebijakan kedaulatan energi Rusia di era Vladimir Putin (kurun 2000–2022) dan kaitannya dengan strategi pertahanan nasional Rusia. Sebagai perbandingan kontekstual, studi ini juga meninjau kebijakan energi dan pertahanan Indonesia pada periode yang relevan (misalnya Kebijakan Energi Nasional 2014, Rencana Strategis Pertahanan 2020-2024, hingga inisiatif *green defense* TNI terkini). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan, pidato, dan konteks historis yang melatarbelakangi strategi kedua negara.

Data dan Sumber: Penelitian memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber kredibel. Sumber primer mencakup dokumen resmi pemerintah Rusia, antara lain *Energy Strategy of Russia 2010* dan *Energy Strategy 2020*, Doktrin Keamanan Energi (2019), serta pidato-pidato Putin yang relevan (contoh: pidato tahunan Federal Assembly yang menyenggungkan isu energi dan pertahanan). Data angka pendukung diambil dari laporan statistik (BP Statistical Review, laporan OPEC/IEA) untuk melihat porsi ekspor energi dalam ekonomi Rusia. Sementara itu, untuk Indonesia digunakan dokumen Kebijakan Energi Nasional (*KEN*), Undang-Undang Energi, dokumen *Visi Indonesia 2045*, serta dokumen pertahanan (misal Doktrin TNI terbaru, kebijakan Komponen Cadangan dan Pendukung). Sumber sekunder berupa literatur akademik dan laporan think-tank: artikel jurnal tentang keamanan energi, publikasi lembaga riset (CNA, CSIS, Chatham House) mengenai dampak sanksi terhadap militer Rusia, serta laporan kebijakan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI terkait program kemandirian energi pertahanan. Berbagai berita dan analisis media terpilih juga dijadikan referensi untuk melacak peristiwa (contoh: krisis gas 2009, akuisisi Freeport 2018, proyek energi-pertahanan di Indonesia).

Teknik Analisis: Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif-kualitatif. Pertama, penulis melakukan *content analysis* terhadap langkah-langkah Putin dalam mengintegrasikan sektor energi ke strategi pertahanan Rusia. Hal ini mencakup analisis kebijakan (misal subsidi bahan bakar untuk militer, prioritas belanja pertahanan dari pendapatan migas) dan tindakan strategis (misal penggunaan pasokan gas untuk tekanan politik). Kedua, penulis menganalisis kondisi Indonesia saat ini: sejauh mana kebijakan energi nasional sudah mendukung kebutuhan pertahanan. Apakah Indonesia memiliki kerangka untuk mengonversi kekayaan SDA menjadi kekuatan pertahanan. Sebagai contoh, dianalisis tingkat ketergantungan TNI pada impor BBM dan alutsista, potensi lokal yang bisa dikembangkan (biofuel, industri baterai untuk pertahanan), dan kendalanya. *Gap analysis* dilakukan untuk melihat perbedaan kapasitas dan konteks antara Rusia dan Indonesia.

Setelah itu, dilakukan sintesis untuk merumuskan rekomendasi. Rekomendasi disusun dengan prinsip adaptasi selektif: mengambil pelajaran positif dari model Rusia namun menyesuaikannya dengan nilai, konstitusi, dan tujuan damai Indonesia. Dengan demikian, hasil akhir penelitian ini tidak hanya menjelaskan kasus Rusia, tetapi juga memberikan *roadmap* atau usulan bagi Indonesia dalam membangun sistem pertahanan berbasis SDA strategis secara etis dan berkelanjutan.

Analisis dan Pembahasan

a. Putin dan “Senjata Energi” Rusia

Di bawah Putin, Rusia dengan lugas menjadikan komoditas energinya khususnya gas alam sebagai “senjata” geopolitik yang efektif. Selama dua dekade terakhir, berbagai contoh empiris menunjukkan pola ini. Krisis gas Ukraina 2006 dan 2009 adalah contoh awal: Rusia

memutus total aliran gas yang transit melalui Ukraina di tengah perselisihan harga dan politik, mengakibatkan beberapa negara Eropa kekurangan pasokan musim dingin. Langkah tegas tersebut menekan pemerintah pro-Barat di Kyiv sekaligus memberi sinyal kuat ke Eropa bahwa Kremlin bisa menjadikan mereka sandera energi. Pola serupa terulang dalam krisis 2014–2015 (pasca-annexation Krimea) dan memuncak pada 2021–2022 ketika menjelang invasi ke Ukraina. Putin sengaja menahan ekspor gas ke Eropa. Gazprom mengurangi volume pengiriman gas via jalur Ukraina dan Nord Stream jauh di bawah kontrak, yang menyebabkan harga gas Eropa melonjak tajam. Putin memperhitungkan bahwa “senjata energi” dapat melunakkan posisi Eropa misalnya agar enggan menatuhkan sanksi lebih keras atau mengurangi dukungan ke Ukraina karena ketakutan akan krisis energi domestik. Secara jangka pendek, taktik ini memang menyulitkan Eropa: beberapa industri Eropa terpukul biaya energi tinggi dan pemerintahnya berebut mencari pasokan alternatif. Dari sisi Rusia, meskipun volume ekspor turun, pendapatan finansial justru tertolong oleh harga yang naik. Dengan demikian, secara strategis Rusia berhasil memanfaatkan ketergantungan energi lawan untuk keuntungan geopolitiknya.

Selain penggunaannya terhadap pihak eksternal, Putin juga memastikan kontrol penuh di hulu agar “senjata” ini selalu berada di genggamannya. Setelah berkuasa, Putin menindak oligarki energi yang dinilai tidak sejalan. *Yukos affair* tahun 2003 menjadi contoh dramatis: Mikhail Khodorkovsky, pemilik Yukos yang kritis, ditangkap atas tuduhan pajak, dan aset Yukos senilai puluhan miliar dolar disita negara. Mayoritas aset itu kemudian diserahkan ke Rosneft, perusahaan minyak milik negara yang dipimpin sekutu dekat Putin. Secara *de facto*, ini menandai nasionalisasi sektor minyak strategis Rusia. Pesan politiknya jelas bahwa negara Rusia yang berdaulat harus mengendalikan sepenuhnya SDA vital demi kepentingan nasional. Demikian pula, Gazprom diperlakukan bukan sekadar BUMN profit, tetapi alat geopolitik: Putin menempatkan tokoh kepercayaannya di manajemen, memastikan setiap keputusan ekspor sejalan dengan strategi negara. Bahkan dalam perombakan konstitusi 2020, dimasukkan pasal yang melarang penyerahan aset SDA strategis kepada entitas asing, meneguhkan konsep autarki sumber daya.

Lebih jauh, integrasi energi ke strategi pertahanan terlihat dari dokumen resmi Rusia. Doktrin Keamanan Energi Rusia (2019) menyatakan bahwa ancaman terhadap keamanan energi termasuk sanksi asing atau monopoli infrastruktur oleh pihak luar dipandang sama seriusnya dengan ancaman militer. Dengan demikian, Rusia merasa berhak mengambil tindakan pre-emptive atau retaliatory di sektor energi untuk melindungi keamanan nasionalnya. Ini menjelaskan kenapa Putin tak ragu menggunakan “opsi nuklir” di energi: seperti mematikan keran gas Eropa meski berimplikasi ekonomi besar. Paradigma Putin adalah kedaulatan dan survival negara di atas segalanya, sehingga domain energi pun dimiliterisasi perannya.

Selain itu, Putin menyiapkan Rusia agar tahan banting jika “senjata energi”nya dibalik menyerang dirinya, misalnya lewat embargo. Pasca sanksi Barat 2014, Rusia meluncurkan program *import substitution* besar-besaran. Di sektor energi, mereka mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat (pada proyek LNG, pengeboran Arktik, dll.) dengan mengembangkan teknologi sendiri atau menggandeng China. Di sektor militer, Rusia meningkatkan swasembada: misalnya mengembangkan komponen elektronik militer domestik untuk menggantikan impor Eropa, dan mencari pemasok baru (Iran, Tiongkok) untuk peralatan yang tak bisa diproduksi sendiri. Upaya ini tidak sepenuhnya sukses (banyak sektor masih

tergantung komponen impor), tetapi menunjukkan tekad autarki Putin: mengurangi kerentanan eksternal semaksimal mungkin.

Secara keseluruhan, “senjata energi” ala Putin telah menjadi bagian integral strategi pertahanan Rusia di era modern. Energi digunakan tidak hanya untuk menekan lawan secara ekonomi-politis, tapi juga sebagai pemasok oksigen bagi mesin militer Rusia sendiri. Kombinasi pemanfaatan eksternal dan konsolidasi internal inilah yang membuat strategi Putin unik dan patut dicermati oleh negara lain, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan keuangan SDA-nya.

b. Kemandirian Pertahanan Rusia Berbasis SDA

Kemampuan pertahanan Rusia masa kini dibangun di atas fondasi sumber daya alamnya. Salah satu indikatornya, anggaran pertahanan Rusia sangat bergantung pada pendapatan migas. Pada puncak boom komoditas sekitar 2008, lebih dari 50% anggaran federal Rusia berasal dari minyak dan gas. Bahkan hingga dekade 2010-an, minyak/gas rutin menyumbang sekitar sepertiga APBN Rusia. Ini berarti modernisasi militer Rusia sebenarnya dibiayai oleh sumur minyak dan ladang gas. Misalnya, program modernisasi alutsista besar 2011-2020 (GPV 2020) dengan anggaran raksasa ±US\$700 miliar dimungkinkan karena negara menikmati windfall profit dari harga minyak >\$100/barel pada 2011-2013. Pendapatan SDA tersebut dialihkan untuk membangun kapal selam nuklir baru, rudal hipersonik, tank Armata, dan lain-lain. Dengan kata lain, SDA menjadi *enabler* bagi kekuatan militer Rusia – situasi yang kontras dengan banyak negara (termasuk Indonesia) di mana anggaran pertahanan sering tertekan keterbatasan fiskal.

Selain melalui anggaran, SDA juga menopang pertahanan Rusia secara langsung dalam hal logistik dan ketersediaan material. Rusia memiliki cadangan minyak mentah dan kapasitas kilang cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM militer sendiri, sehingga tidak bergantung impor BBM. Dalam skenario konflik besar, kemampuan domestik ini krusial untuk daya tahan perang (*war endurance*). Demikian pula, sumber daya mineral Rusia (nikel, titanium, uranium, dsb.) mendukung industri militernya Rusia dapat memproduksi baja khusus, bahan bakar nuklir, hingga komponen rudal dari material dalam negerinya. Ketahanan pasokan internal ini menjadi keunggulan strategis: misalnya, sanksi Barat yang melarang penjualan material kunci ke Rusia kurang efektif karena Rusia punya cadangannya atau suplai alternatif.

Namun, pengalaman Rusia juga menunjukkan tantangan kemandirian. Ketika sanksi teknologi dijatuhkan (misalnya embargo microchip, avionik, mesin presisi), industri pertahanan Rusia kesulitan mengisi kekosongan dengan cepat. Meskipun program substitusi impor diluncurkan, hasilnya tidak instan – banyak proyek alutsista tertunda karena komponen asing terputus. Contohnya, produksi massal tank Armata atau pesawat stealth Su-57 molor sebagian akibat kendala teknologi domestik. Rusia mencoba mengatasinya dengan inovasi darurat: memodifikasi elektronik komersial untuk militer, “kanibal” suku cadang dari peralatan lama, dan meningkatkan produksi komponen sederhana. Menariknya, Rusia juga mengakali embargo melalui mitra internasional: mereka mengimpor chip dan komponen Barat via negara pihak ketiga (seperti membeli drone komersial dari China untuk keperluan militer). Bahkan penggunaan drone Geran-2 (versi rebrand drone Iran Shahed-136) adalah contoh bagaimana Rusia memanfaatkan hubungan luar negeri untuk mengisi celah kebutuhan pertahanan di tengah isolasi. Ini menunjukkan bahwa meski bercorak autarki, Rusia tetap harus pragmatis memanfaatkan aliansi atau pasar gelap demi mempertahankan kapasitas militernya.

Dari perspektif *defense economics*, Rusia juga membangun perisai finansial dari SDA untuk memastikan keberlanjutan pertahanannya. Surplus perdagangan energi di masa jaya dialokasikan Putin ke Fund cadangan. Contohnya, Rusia mendirikan *Reserve Fund* dan *National Wealth Fund* yang puncaknya mencapai ratusan miliar dolar sekitar 2013–2014. Dana ini berfungsi sebagai “buffer” ketika pendapatan menurun atau untuk biaya kontingensi (termasuk biaya operasi militer mendadak). Terbukti pada 2022, ketika Rusia dihadapkan pada biaya perang Ukraina dan pengetatan ekonomi, pemerintahnya bisa menggunakan dana tersebut (walau sebagian dibekukan di luar negeri karena sanksi) untuk menopang stabilitas jangka pendek. Dengan kata lain, Putin memanfaatkan kekuatan SDA untuk membeli waktu dan ruang bagi militernya menghadapi situasi sulit.

Pelajaran penting dari kemandirian pertahanan Rusia adalah bahwa *self-reliance* di sektor kritis memberi ketahanan lebih saat krisis, namun membutuhkan investasi besar dan perencanaan jangka panjang. Rusia menghabiskan waktu belasan tahun membangun kapasitas dalam negeri (dari kilang minyak baru, pabrik senjata baru, riset teknologi) agar mencapai tingkat swasembada tertentu. Bahkan dengan itu pun, masih ada mata rantai global yang tak bisa sepenuhnya dilepaskan. Bagi Indonesia, ini berarti kemandirian pertahanan berbasis SDA harus mulai dibangun jauh sebelum krisis terjadi. Jika tidak, ketika importasi terhenti mendadak (misal akibat konflik regional atau embargo), kemampuan pertahanan bisa lumpuh. Rusia relatif siap karena sejak 2014 sudah “dipaksa” mandiri dan beradaptasi, sedangkan Indonesia perlu skenario antisipatif serupa. Misalnya, bagaimana jika impor BBM dan suku cadang alutsista Indonesia tersendat. Apakah kita memiliki cadangan strategis dan kapasitas lokal untuk menopangnya. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab dalam perencanaan pertahanan Indonesia ke depan, mengambil pelajaran dari pengalaman Rusia yang resilience berkat SDA-nya sendiri.

c. Pelajaran untuk Indonesia : Pembangunan Pertahanan Berbasis SDA

Bagi Indonesia, yang diberkahi kekayaan SDA, pengalaman Rusia menawarkan inspirasi sekaligus peringatan. Inspirasi utamanya adalah bahwa kekayaan SDA dapat diterjemahkan menjadi kekuatan pertahanan apabila dikelola strategis. Indonesia memiliki sumber daya migas (minyak bumi dan gas alam), batubara sebagai energi, serta mineral strategis seperti nikel, timah, tembaga, rare earth, yang kesemuanya bisa mendukung industri pertahanan dan kebutuhan energi militer. Namun, tantangannya Indonesia hingga kini belum optimal memanfaatkan SDA untuk pertahanan. Berikut beberapa poin pelajaran dan rekomendasi:

Pertama, ketahanan energi untuk militer perlu menjadi agenda prioritas. Saat ini, TNI masih bergantung pada pasokan BBM dari pasar domestik yang sayangnya sebagian berasal dari impor (khususnya BBM jenis tertentu). Dalam situasi konflik atau darurat, ketergantungan impor BBM ini bisa menjadi titik rentan. Belajar dari Rusia yang swasembada BBM, Indonesia harus memastikan jaminan suplai energi domestik bagi kebutuhan pertahanan. Ini mencakup pembangunan cadangan BBM strategis yang dikhususkan untuk TNI, diversifikasi sumber energi militer (misalnya program *biofuel* TNI untuk menggantikan solar impor, pemanfaatan avtur produksi lokal untuk AU, dll.), dan peningkatan kapasitas produksi kilang dalam negeri. Program seperti BBN (Bahan Bakar Nabati) untuk pertahanan bisa diakselerasi: uji coba penggunaan biodiesel pada kendaraan tempur atau kapal patroli sudah saatnya diperluas. Apalagi pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo telah mencanangkan Program Ketahanan

Energi nasional sebagai inisiatif unggulan, di mana sektor pertahanan dilibatkan aktif. Kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan – misalnya Pertamina dan TNI AD bekerja sama membangun tangki cadangan BBM di pulau-pulau strategis, atau proyek bersama ESDM-Kemhan untuk memastikan setiap pangkalan militer memiliki sumber listrik mandiri (panel surya, genset biomassa) saat keadaan darurat.

Kedua, industri pertahanan berbasis SDA harus dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian alutsista. Indonesia telah mulai mengembangkan industri pertahanan (PT Pindad, PT PAL, PT DI, dll.), namun banyak bahan baku dan komponen masih diimpor. Padahal SDA lokal kita dapat mendukung pembuatan berbagai komponen. Contoh strategis adalah nikel, Indonesia penghasil nikel terbesar dunia, dan nikel adalah bahan utama baterai litium. Dengan visi alutsista listrik/elektrifikasi ke depan (misal kendaraan tempur listrik, drone listrik), Indonesia bisa memanfaatkan nikel domestik untuk membangun industri baterai militer sehingga tidak bergantung pada produk asing. Demikian pula, ketersediaan baja dan aluminium dalam negeri bisa diarahkan untuk pemenuhan material kapal perang atau pesawat. Pemerintah perlu mendorong hilirisasi mineral yang nyambung dengan kebutuhan pertahanan. Langkah konkret misalnya: mendirikan pabrik propelan (bahan peledak) dengan memanfaatkan sumber bahan kimia lokal; mengembangkan bahan baku roket dari kemajuan teknologi biofuel; hingga pemanfaatan *rare earth elements* (REE) kita untuk komponen elektronik militer.

Tanda-tanda positif sudah terlihat. Pemerintahan Prabowo sejak 2024 menaruh perhatian besar pada kemandirian energi dan industri strategis. Misalnya, dilaporkan Kementerian Pertahanan menjalin sinergi dengan kementerian lain untuk program biodiesel di Papua menanam sawit dan produksi biodiesel lokal guna mengurangi ketergantungan solar impor di wilayah timur. Pemerintah juga mendukung kolaborasi BUMN energi dan pertahanan, contohnya proyek “RIG Merah Putih”. RIG Merah Putih adalah rig pengeboran migas berkapasitas besar hasil pengembangan kolaborasi Pertamina (*subholding drilling*) dan PT Pindad. Ini bukan sekadar alat baru, tapi simbol kemandirian teknologi migas Indonesia. Rig tersebut sepenuhnya buatan anak bangsa dan menjadi pionir swasembada teknologi permifyakan. Kolaborasi lintas industri strategis ini memperkuat integrasi sektor energi dan pertahanan, serta menegaskan peran BUMN sebagai motor kemandirian nasional. Dengan rig buatan sendiri, Indonesia dapat mengebor lebih banyak sumur minyak setiap tahun tanpa bergantung alat sewaan asing, artinya meningkatkan produksi energi domestik sekaligus memastikan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri (termasuk TNI) lebih terjamin.

Langkah-langkah seperti di atas perlu diperbanyak. *Blue print* pertahanan Indonesia ke depan idealnya mencakup komponen SDA secara eksplisit. Misalnya, TNI bisa memiliki komando atau badan khusus yang mengurus logistik energi dan sumber daya strategis (setara dengan konsep *Energy Command*). Program riset pertahanan juga bisa difokuskan pada energi baru: pengembangan sel surya tahan medan untuk tenda prajurit, bahan bakar bio-avtur untuk pesawat militer, atau bahkan nuklir skala kecil untuk kapal selam di masa depan, mengingat Indonesia punya cadangan uranium yang belum dimanfaatkan.

Singkatnya, pelajaran dari Rusia mendorong Indonesia untuk tidak menunggu krisis guna membangun kemandirian SDA. Dengan potensi yang ada, Indonesia dapat mulai sekarang melakukan langkah-langkah proaktif: meningkatkan cadangan strategis, memperkuat sinergi BUMN energi-pertahanan, serta investasi pada industri pertahanan berbasis SDA. Tantangannya tentu ada (dari sisi pendanaan, teknologi, maupun koordinasi kebijakan), namun

manfaat jangka panjangnya sebanding: pertahanan Indonesia akan lebih tahan guncangan dan mampu berdiri di kaki sendiri.

d. Adaptasi Doktrin Pertahanan Indonesia

Mengadopsi konsep autarki seperti Rusia perlu disaring melalui nilai dan konteks Indonesia. Doktrin pertahanan Indonesia harus mengadaptasi autarki secara terbatas dan etis, bukan meniru mentah-mentah. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bahwa segala kebijakan harus berkeadilan, berperikemanusiaan, dan tidak agresif. Oleh karenanya, Indonesia dapat mengembangkan doktrin pertahanan berbasis kemandirian SDA yang fokusnya internal strengthening tanpa eksternal domination.

Prinsip adaptasi ini bisa disebut “autarki terbatas Pancasila”: kita mandiri dalam hal-hal krusial untuk *war resilience* (ketahanan perang), namun tetap terhubung secara internasional dalam hal non-krusial demi perdamaian dan kemakmuran bersama. Dalam praktik, doktrin pertahanan perlu menegaskan pilar kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya vital lainnya sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Semesta. Konsep Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) sebenarnya sudah membuka jalan: seluruh sumber daya nasional digerakkan untuk pertahanan. Ini dapat di-update dengan memasukkan agenda ketahanan energi nasional sebagai salah satu pilar doktrin pertahanan. Misalnya, Doktrin TNI dapat ditambahkan butir yang menyebut “setiap upaya pertahanan harus didukung kemandirian logistik nasional, terutama energi, pangan, dan sumber material strategis, sesuai amanat Pasal 30 dan 33 UUD 1945.” Hal ini akan memberi payung bahwa militer, pemerintah, dan industri perlu terintegrasi mencapai kemandirian tersebut.

Pemerintahan Presiden Prabowo sendiri sudah mencanangkan 8 misi strategis (Asta Cita) yang salah satunya adalah Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan target modernisasi alutsista dan kemandirian pangan-energi-air sebagai satu paket ketahanan komprehensif. Jadi secara politis, arah kebijakan sudah selaras. Tantangannya tinggal operasionalisasi di level doktrin dan program. Beberapa strategi adaptasi yang bisa dijalankan antara lain:

1) Sinergi Militer–BUMN Energi: TNI dapat menjalin kerjasama formal dengan BUMN seperti Pertamina, PLN, PGN untuk membentuk komponen pendukung khusus di bidang energi. Tujuannya membangun cadangan BBM perang dan memastikan suplai listrik/BBM prioritas ke objek vital pertahanan jika krisis. Misalnya, pembangunan tangki cadangan Pertamina di dekat pangkalan TNI, atau skema alokasi gas domestik tertentu untuk kebutuhan armada TNI AL.

2) Riset dan Inovasi Energi Pertahanan: Pemerintah perlu mendorong litbang energi yang mendukung operasi militer hijau dan mandiri. Contoh: inovasi *bio-diesel* tinggi (B50 ke atas) untuk kapal patroli agar tidak tergantung solar impor, *fuel cell* atau tenaga surya untuk perangkat komunikasi dan sensor di lapangan (sehingga prajurit bisa bertahan tanpa pasokan baterai eksternal lama), hingga pengembangan *baterai lithium nasional* untuk kendaraan militer elektrik. Investasi dalam inovasi ini akan membawa kapasitas internal jangka panjang.

Dengan strategi-strategi di atas, adaptasi doktrin bukan sekadar wacana tapi diwujudkan dalam program nyata. Tentu, Indonesia harus menetapkan batas etis: kemandirian bukan berarti isolasi. Kita tetap menganut politik bebas-aktif dan kerjasama internasional. Autarki

terbatas hanya untuk elemen vital, sedangkan hal lain tetap bekerja sama (contoh: kita bisa impor teknologi non-strategis, latihan militer dengan negara sahabat, dsb.).

Mengapa hal ini penting, Karena dunia kini saling terhubung; kemandirian absolut seperti era Perang Dingin tidak realistik atau malah kontra-produktif. Indonesia harus pintar menentukan mana yang harus mandiri dan mana yang boleh berbagi. Bahan pangan pokok, energi primer, senjata dasar, idealnya mandiri. Sementara teknologi canggih tertentu mungkin lebih efisien lewat aliansi (contoh: join production pesawat tempur dengan Korea). Doktrin pertahanan Indonesia perlu fleksibel mengakomodasi ini, namun tetap menegaskan prinsip: dalam krisis, Indonesia harus bisa berdiri sendiri minimal untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu, pembangunan komponen cadangan berupa stok SDA dan kapasitas produksi lokal menjadi keniscayaan. Ini sejalan dengan konsep *ketahanan nasional* yang diamanatkan GBHN dan visi Indonesia 2045.

Terakhir, adaptasi juga perlu memperhatikan struktur ekonomi-politik domestik. Di Rusia, Putin bisa memaksa kebijakan autarki karena kontrol terpusatnya kuat. Di Indonesia yang demokratis, pendekatan harus persuasif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (legislatif, daerah, swasta). Perlu edukasi publik bahwa mungkin ada biaya jangka pendek untuk kemandirian (misal harga energi sedikit lebih tinggi karena pakai komponen lokal), tapi *benefit* jangka panjang bagi keamanan nasional sangat besar. Jika doktrin dan narasi ini kuat, maka dukungan nasional bisa terbangun sebagaimana semangat Bela Negara.

e. Etika Pancasila vs Hegemoni Energi: Positioning Indonesia

Satu aspek penting yang membedakan Indonesia dari Rusia adalah pendekatan etis dan ideologis dalam memanfaatkan kekuatan SDA. Vladimir Putin kerap dikritik oleh dunia internasional karena menggunakan energi sebagai alat mengancam dan “memeras” negara lain – perilaku yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kerjasama. Dalam Pancasila, prinsip seperti Kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila II) dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila V) menegaskan bahwa kita tidak boleh semena-mena merugikan pihak lain demi keuntungan sendiri. Oleh karena itu, Indonesia harus mengelola SDA dengan bertanggung jawab dan beretika, bahkan ketika fokus pada kepentingan nasional.

Artinya, walaupun Indonesia berusaha mandiri dan kuat di bidang energi, kita tidak akan menjadikan energi sebagai alat agresi atau dominasi terhadap negara lain. *Energy blackmail* seperti yang dilakukan Rusia bukanlah opsi sesuai falsafah Indonesia. Sebaliknya, Indonesia selalu mendorong kerjasama saling menguntungkan dalam diplomasi energi (contoh: ASEAN Power Grid, kerjasama gas pipa dengan Malaysia/Singapura, dll.). Ini selaras dengan pernyataan Menlu Retno Marsudi yang menawarkan konsep “kepemimpinan global tanpa hegemoni”, kepemimpinan yang mengedepankan dialog, kolaborasi, dan harapan bersama daripada dominasi kekuatan. Indonesia percaya bahwa menjadi kuat tidak perlu membuat orang lain lemah; kita bisa memimpin dengan memberi contoh dalam penggunaan SDA secara damai dan berkelanjutan.

Namun, tanpa hegemoni bukan berarti lemah ke dalam. Dalam konteks internal, Indonesia harus tegas melindungi kedaulatan SDA dari eksploitasi asing yang merugikan bangsa. Ini wujud keadilan bagi rakyat sendiri. Contoh keberhasilan seperti pengambilalihan 51% saham Freeport (Tambang Grasberg) tahun 2018 menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersikap tegas untuk menguasai SDA strategisnya tanpa melanggar hukum internasional. Langkah tersebut dipandang sebagai capaian kedaulatan ekonomi, di mana hasil tambang kini

lebih banyak untuk negeri sendiri. Demikian pula, berbagai kebijakan hilirisasi mineral yang melarang ekspor mentah (nikel ore contohnya) menuai protes WTO, tapi Indonesia tetap menjalankannya demi nilai tambah nasional. Sikap ini menggambarkan implementasi nilai Pancasila dalam konteks kedaulatan: berdikari secara ekonomi demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sila V), dan membebaskan diri dari bentuk-bentuk kolonialisme ekonomi baru.

Dalam tradisi TNI dan sejarah perjuangan, sikap anti-dominasi asing sudah mendarah daging. Dari pertempuran melawan penjajah hingga menghadapi ancaman proxy war modern, semangat kejuangan Indonesia selalu diwarnai tekad menjaga kedaulatan. Oleh karena itu, pembangunan pertahanan berbasis SDA harus dilihat sebagai kelanjutan sejarah perjuangan tersebut, "berjuang dengan kekuatan sendiri". Tentu, bedanya musuh sekarang bukan tentara kolonial melainkan kemiskinan energi atau ketergantungan teknologi. Maka, etos Pancasila mengajarkan kita untuk *mandiri tapi tidak egois*. Kita kuat agar bisa membantu yang lemah, kita cukup agar bisa berbagi berlebih. Misalnya, andaikata Indonesia kelak surplus energi berkat kemandirian, kita justru bisa menjadi penyuplai stabilitas kawasan (menjual BBM ke negara tetangga dengan adil, dsb.), bukan menjadi semacam *big bully*. Inilah perbedaan fundamental pendekatan Indonesia dibanding Rusia: kekuatan disertai tanggung jawab moral.

Posisi ini justru bisa menjadi nilai jual Indonesia di forum global. Di tengah kekhawatiran dunia pada *weaponization of resources* oleh kekuatan besar, Indonesia dapat tampil menawarkan paradigma alternatif. Sebagai contoh, Indonesia bisa memprakarsai "Kesepakatan Energi ASEAN" dimana negara kuat energi membantu anggota yang defisit saat krisis, sehingga tidak ada yang memanfaatkan kelebihan energi untuk menekan yang lain. Konsep semacam ini akan menegaskan kepemimpinan Indonesia yang berlandaskan *soft power* Pancasila. Hal ini selaras dengan peran Indonesia selama ini yang cenderung jadi juru damai, *honest broker*, dan *problem solver* di berbagai isu global.

Akhirnya, secara internal, membangun kemandirian sumber daya tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Tantangan etisnya, kita harus memastikan bahwa upaya ini tidak membuat kita terperangkap dalam nasionalisme sempit atau politisasi SDA untuk kepentingan segelintir elit. Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan, maka pengelolaan SDA harus transparan, hasilnya dirasakan rakyat banyak, dan tidak merusak lingkungan (Sila ke-5 juga mengandung keadilan antargenerasi, menjaga alam). Dengan panduan etika ini, Indonesia dapat melangkah menuju kemandirian pertahanan berbasis SDA tanpa meninggalkan jati diri sebagai bangsa yang cinta damai dan adil.

Kesimpulan

Vladimir Putin telah menunjukkan pada dunia bahwa kontrol atas sumber daya, terutama energi dapat menjadi landasan kokoh bagi kekuatan pertahanan dan posisi tawar nasional. Kepemimpinannya yang bercorak autarki berhasil mendorong Rusia lebih mandiri dalam menghadapi tekanan eksternal. Rusia di bawah Putin berani menggunakan "senjata energi" untuk mencapai tujuan geopolitik, sekaligus memupuk ketahanan internal dengan swasembada di sektor strategis. Hasilnya, meskipun hubungan Rusia dengan Barat memburuk dan dihujani sanksi, Rusia mampu bertahan dan tetap menegakkan kepentingannya (walau dengan biaya ekonomi tertentu). Ini menandakan bahwa kedaulatan energi bukan sekadar jargon, melainkan elemen nyata dari strategi pertahanan modern.

Bagi Indonesia, kedaulatan energi juga bukan pilihan, melainkan keharusan demi keamanan nasional jangka panjang. Pelajaran dari Rusia menggarisbawahi urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian di sektor energi dan SDA strategis lain guna mendukung pertahanan. Indonesia memiliki modal SDA melimpah; tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikannya ke dalam *grand strategy* pertahanan. Tentu, pendekatan Indonesia harus berbeda dalam hal etika dan tujuan. Kita tidak akan mengadopsi politik *energy blackmail* ala Putin yang agresif. Sebaliknya, Indonesia perlu menempuh jalan tengah: memanfaatkan SDA strategis bagi ketahanan nasional tanpa melanggar prinsip perdamaian dan keadilan internasional.

Untuk itu, beberapa rekomendasi kunci dapat disampaikan. Pertama, integrasikan agenda kemandirian energi ke dokumen dan doktrin pertahanan secara eksplisit. Kementerian Pertahanan dan ESDM harus menyusun kebijakan lintas-sektor yang sinkron, misalnya program Bahan Bakar Nasional untuk TNI atau cadangan energi pertahanan. Kedua, wujudkan komitmen tersebut melalui proyek nyata: bangun infrastruktur cadangan energi (gudang BBM, depot gas) khusus pertahanan, dukung BUMN dan swasta nasional dalam pengembangan teknologi energi baru untuk militer, dan arahkan sebagian dana *sovereign wealth fund* (LPI/INA) untuk investasi di industri pendukung pertahanan berbasis SDA. Ketiga, siapkan kerangka regulasi yang melindungi SDA strategis dari akuisisi asing yang merugikan, tapi sekaligus mendorong alih teknologi melalui kemitraan yang menguntungkan pertahanan.

Apabila langkah-langkah ini konsisten dijalankan, Indonesia dapat memperkuat postur pertahanannya menuju 2045 yang tangguh dan mandiri. Kemandirian bukan berarti menutup diri, melainkan memiliki *bantalan sendiri* sehingga ketika terguncang gejolak global, pertahanan dan ekonomi nasional tidak mudah runtuh. Dengan didasari etika Pancasila, Indonesia dapat membuktikan bahwa negara berkembang pun bisa berdaulat sumber daya tanpa menjadi ancaman bagi dunia, melainkan justru berkontribusi bagi stabilitas dan kemakmuran bersama. Mencapai hal ini tentu tidak mudah dan memerlukan visi jangka panjang, tetapi visi tersebut sudah selayaknya menjadi tekad kita bersama demi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan berkepribadian luhur.

Daftar Pustaka

- Arismunandar, S. (2024). *Indonesia Menawarkan Kepemimpinan Global Tanpa Hegemoni dan Dominasi Kekuatan*. ORBITIndonesia.com – Artikel, 20 Oktober 2024.orbitindonesia.com
- Boulègue, M. (2025). *Russia's Struggle to Modernize its Military Industry: How sanctions, war and "innovation stagnation" are weakening Moscow's capabilities*. Chatham House Report, 21 Juli 2025.chathamhouse.orgchathamhouse.org
- Darusalam, U. & Fitri, I. (2016). *Kedaulatan Energi Nasional: Penguatan Peran Negara Berdaulat & Pemberdayaan Sumber Daya Insani*. Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40 No. 54 (Desember 2016).journal.unas.ac.id
- Kementerian ESDM & Kementerian Pertahanan RI. (2025). *Sinergi Ketahanan Energi dan Pertahanan – Laporan Kebijakan*. (Program ketahanan energi nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, termasuk kolaborasi pengembangan biodiesel)kemhan.go.id.
- Kementerian Pertahanan RI. (2025). *Perkuat Sinergitas Ketahanan Energi, Menhan Kunjungi Program Biodiesel di Papua*. Berita Kemhan, 8 Juni 2025kemhan.go.idkemhan.go.id
- Government of Russian Federation. (2003). *Energy Strategy of Russia to 2020*. (Dokumen strategi energi Rusia, menetapkan visi pemanfaatan SDA untuk pertumbuhan ekonomi dan kekuatan nasional).
- Prokip, A. (2025). *Russia's Gas Transit through Ukraine: End of an Era?* Wilson Center Blog – Kennan Institute, 4 Februari 2025wilsoncenter.orgwilsoncenter.org.

- PT Pertamina & PT Pindad. (2025). *RIG Merah Putih, Simbol Kolaborasi Energi dan Pertahanan Indonesia*. RuangEnergi.com – Berita Energi, 21 Agustus 2025ruangenergi.comruangenergi.com.
- Sabadus, A. (2022). *Putin's energy weapon: Europe must be ready for Russian gas blackmail*. Atlantic Council – UkraineAlert Blog, 8 Juli 2022atlanticcouncil.orgatlanticcouncil.org.
- Tentara Nasional Indonesia. (2021). *Doktrin Pertahanan TNI* (Doktrin Tri Dharma Eka Paksi edisi terkini). (Menekankan peran komponen cadangan dan sumber daya nasional dalam sistem pertahanan semesta).
- Universitas Negeri Surabaya (UNESA). (2025). *Asta Cita: Delapan Misi Menuju Indonesia Emas 2045*. Artikel serba-serbi Unesa, 8 Januari 2025pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id.
- Reuters – Davies, M., Stubbs, J., & Escritt, T. (2014). *Court orders Russia to pay \$50 billion for seizing Yukos assets*. Reuters World News, 28 Juli 2014reuters.com.